

# LKIP DPMPTK 2024

**DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja. Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran

kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Koba, Januari 2025

KEPALA DPMPTK  
KABUPATEN BANGKA TENGAH



**Dra. WIWIK SUSANTI**  
**NIP 19680521 199403 2 001**  
**Pembina Utama Muda/IV c**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKIP Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTK) Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah. Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) DPMPTK Kabupaten Bangka Tengah yang telah dicanangkan pada tahun 2024 telah berhasil dicapai.

Pada tahun 2024 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah menetapkan sebanyak 3 tujuan, 5 sasaran dengan 5 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja, dengan Target Indikator kinerja Persentase pencari kerja yang ditempatkan sebesar 81,80% dan terealisasi sebesar 49,74%, dengan capaian 60,79%. Target anggaran sebesar Rp 39.940.000, realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 38.780.992 atau 97,09%. Nilai Realisasi ini tidak mencapai target dikarenakan Pengaruh

besar isu pertambangan dengan kasus yang lagi viral di Bangka Belitung yang mengakibatkan perekonomian di Kabupaten Bangka Tengah mengalami penurunan serta lowongan kerja yang terbatas dan lowongan kerja yang tidak sesuai keahlian dan keterampilan para pencari kerja.

2. Sasaran Menurunnya Pemutusan Hubungan Kerja, dengan Target Indikator kinerja Tingkat Pemutusan Hubungan Kerja sebesar 0,20% dan terealisasi sebesar 9,45%, dengan capaian -4650%. Target anggaran sebesar Rp 31.820.000, realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 31.520.000 atau 99,05%. Semakin kecil jumlah tenaga kerja yang di PHK, maka capaian kinerja akan semakin baik. Berdasarkan angka tersebut, dapat dilihat bahwa realisasi Tingkat Pemutusan Hubungan Kerja cukup tinggi dan jauh dari capaian target yang ditetapkan dikarenakan terdapat beberapa perusahaan di Kabupaten Bangka Tengah saat ini tidak melanjutkan/tidak beroperasi yang mengakibatkan peningkatan yang signifikan terhadap pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kerja.
3. Meningkatnya Investasi di Kabupaten Bangka Tengah, dengan Target Indikator kinerja Kenaikan Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal sebesar 2,50% dan terealisasi sebesar -51,66%, dengan capaian -2068%. Target anggaran sebesar Rp 617.674.000, realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 480.604.072 atau 77,80%. Berdasarkan perhitungan realisasi tersebut, Kenaikan nilai realisasi investasi penanaman modal tahun 2024 tidak mencapai target dikarenakan:
  1. Masih ada perusahaan-perusahaan yang belum menyampaikan laporan perkembangan penanaman modal (LKPM);
  2. Masih ada perusahaan yang belum menjalankan usahanya dikarenakan baru terbit NIB nya saja, sedangkan kelengkapan izin lainnya masih dalam proses seperti izin AMDAL atau IUP;
  3. Masih rendahnya minat calon investor untuk berinvestasi, karena Banyak lahan yang berstatus Hutan Lindung;
  4. Tanggal masa pelaporan yang terbatas, sedangkan rekapakan keuangan belum selesai dikeluarkan pihak akunting, sehingga admin yang

berkewajiban tidak bisa menyampaikan laporan LKPM nya karena sudah lewat dari tanggal pelaporan;

5. Promosi Invetasi yang belum optimal;
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan, dengan Target Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan sebesar 90,10 dan terealisasi sebesar 90,46 dengan capaian 99,30%. Target anggaran sebesar Rp 96.200.000, realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 95.529.264 atau 96,95%. Pencapaian kinerja tersebut dapat melebihi target dikarenakan adanya pelaksanaan pendampingan dan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik kepada Masyarakat dan pelaku usaha yang belum memahami proses perizinan terutama perizinan melalui sistem OSS adanya komitmen para petugas pelayanan yang mampu memberikan layanan secara baik dan sesuai aturan. Pada Tahun 2024 juga telah diresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bangka Tengah di Kecamatan Pangkalanbaru sebagai sarana untuk memudahkan masyarakat melakukan proses perizinan sehingga dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin melakukan proses perizinan terutama bagi masyarakat atau pelaku usaha di daerah Kecamatan Pangkalanbaru.
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan Target Indikator Kinerja Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja DPMPTK sebesar 80,70 dan terealisasi sebesar 76,54 dengan capaian 94,85%. Target anggaran sebesar Rp 4.512.274.000, realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 4.233.820.695 atau 93,82%. Berdasarkan hal tersebut Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja DPMPTK Pada Tahun 2024 belum mencapai target, dengan beberapa rekomendasi dari Inspektorat yaitu:
  1. Memperbaiki Cascading yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/ Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (sampai ke staf/pelaksana /jabatan fungsional/ operasional).

2. Membuat Crosscutting yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan.
3. Meningkatkan komitmen seluruh pegawai untuk memahami dan peduli terhadap kinerja yang telah direncanakan.
4. Mendokumentasikan keterlibatan pimpinan sebagai pengambil keputusan (Decision Maker).
5. Meningkatkan komitmen seluruh pegawai untuk memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
6. Membuat penjelasan dan analisa perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional (Benchmark Kinerja) pada laporan kinerja.
7. Mendokumentasikan keterlibatan pimpinan dalam penyajian informasi pada laporan akuntabilitas kinerja.
8. Meningkatkan komitmen seluruh pegawai atas penyajian informasi dalam laporan kinerja.
9. Membuat evaluasi akuntabilitas kinerja (evaluasi rencana aksi) pada seluruh unit kerja secara berjenjang.
10. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dengan membuat matrik rencana aksi tindaklanjut, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar perbaikan dokumen perencanaan tahun selanjutnya.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah .....	4
D. Landasan Hukum .....	7
E. Sistematika .....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	9
A. Rencana Strategis .....	9
B. Rencana Kinerja Tahun 2024 .....	16
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	31
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	33
B. Realisasi Anggaran .....	64
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	66
BAB IV PENUTUP .....	78
LAMPIRAN .....	xx
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH .....	xx
MATRIKS RENSTRA .....	xx
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	xx
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH .....	xx



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan

dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

## **B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 95 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Tenaga Kerja mempunyai tugas: membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Tenaga Kerja yang menjadi Kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

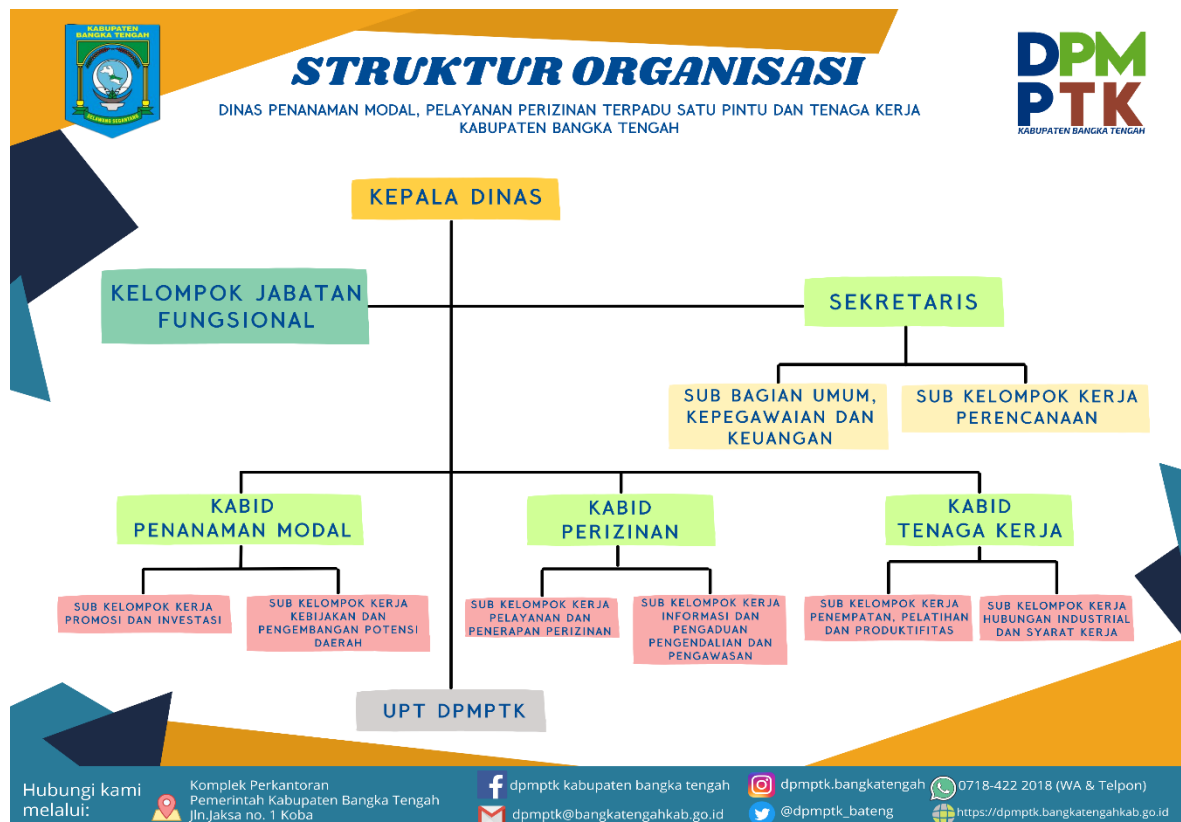
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut DPMPTK mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala DPMPTK sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah.

**Gambar 1.1.**  
**Struktur Organisasi DPMPTK**



Sumber: Peraturan Bupati Bangka Tengah No 95 Tahun 2022

### C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja periode 2021 - 2026 sebagai berikut :

1. Perlunya pengembangan pelatihan disertai dengan peningkatan motivasi bagi pencari kerja sesuai dengan kebutuhan wirausaha dan kebutuhan pasar serta dinamika teknologi dan digitalisasi;
2. Perlunya penyediaan tenaga kerja yang tangguh, mau bekerja keras dan bermotivasi tinggi sehingga ke depan tidak ada lagi kejadian lowongan kerja yang ditawarkan tidak mendapatkan respon yang baik dari pencari kerja;
3. Perlunya sertifikat kompetensi bagi pencari kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
4. Ketersediaan lowongan kerja yang ditawarkan perusahaan tidak sesuai dengan kompetensi pencari kerja;
5. Bagi pekerja/buruh terjadinya PHK merupakan awal pengangguran atau awal dari kesulitan kehidupan;
6. Optimalisasi implementasi UU Ketenagakerjaan (UU Cipta Kerja) pada perusahaan;
7. Optimalisasi pemenuhan sarana hubungan industrial pada perusahaan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;

8. Sengketa antara pekerja dan pengusaha, perlu difasilitasi secara optimal oleh pemerintah dalam penyelesaiannya agar tercapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak;
9. Perlunya evaluasi dan Updating regulasi/kebijakan penanaman modal guna peningkatan iklim penanaman modal;
10. Perlunya Sosialisasi Kebijakan pemberian insentif dan kemudahan berusaha untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha;
11. Perlunya optimalisasi Kajian Potensi dan Peluang Investasi yang siap ditawarkan kepada calon investor;
12. Perlunya Optimalisasi kesiapan status lahan dalam hal mendukung potensi dan peluang investasi di Kabupaten Bangka Tengah;
13. Perlunya optimalisasi Fasilitasi dan Koordinasi dengan pelaku usaha dalam Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal belum;
14. Perlunya pelaku usaha agar dapat memenuhi hak dan kewajiban serta mentaati peraturan terkait dengan kegiatan usahanya;
15. Perlunya upaya jemput bola guna fasilitasi calon investor yang akan masuk maupun penyelesaian permasalahan usaha;
16. Tuntutan pelayanan publik yang transparan, cepat, obyektif, efisien, dan professional;
17. Perlunya memfasilitasi dan mendampingi pelaku usaha dalam proses pengurusan izin terutama pada sistem OSS;
18. Perlunya penyebaran informasi layanan, inovasi, peraturan baru dan sistem informasi pelayanan;
19. Perlunya Peningkatan Kualitas SDM berupa pemahaman dan kompetensi dalam proses penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
20. Perlunya penyajian data yang valid dan update, yang menggambarkan pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan;

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Perlunya pengembangan pelatihan disertai dengan peningkatan motivasi bagi pencari kerja sesuai dengan kebutuhan wirausaha dan kebutuhan pasar serta dinamika teknologi dan digitalisasi;;
2. Bagi pekerja/buruh terjadinya PHK apalagi dalam situasi kesulitan kesempatan mencari kerja merupakan awal pengangguran atau awal dari kesulitan kehidupan;
3. Perlunya sertifikat kompetensi bagi pencari kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
4. Ketersediaan lowongan kerja yang ditawarkan perusahaan tidak sesuai dengan kompetensi pencari kerja;
5. Optimalisasi implementasi UU Ketenagakerjaan (UU Cipta Kerja) pada perusahaan;
6. Optimalisasi pemenuhan sarana hubungan industrial pada perusahaan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
7. Sengketa antara pekerja dan pengusaha, perlu difasilitasi secara optimal oleh pemerintah dalam penyelesaiannya agar tercapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak;
8. Perlunya optimalisasi Kajian Potensi dan Peluang Investasi yang siap ditawarkan kepada calon investor;
9. Perlunya Optimalisasi kesiapan status lahan dalam hal mendukung potensi dan peluang investasi di Kabupaten Bangka Tengah;
10. Perlunya Optimalisasi promosi guna peningkatan investasi;

11. Perlunya optimalisasi Fasilitasi dan Koordinasi dengan pelaku usaha dalam Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal belum;
12. Perlunya pelaku usaha agar dapat memenuhi hak dan kewajiban serta mentaati peraturan terkait dengan kegiatan usahanya;
13. Perlunya upaya jemput bola guna fasilitasi calon investor yang akan masuk maupun penyelesaian permasalahan usaha;
14. Perlunya memfasilitasi dan mendampingi pelaku usaha dalam proses pengurusan izin terutama pada sistem OSS;
15. Perlunya penyebarluasan informasi layanan, inovasi, peraturan baru dan sistem informasi pelayanan;
16. Perlunya Peningkatan Kualitas SDM berupa pemahaman dan kompetensi dalam proses penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
17. Perlunya penyajian data yang valid dan update, yang menggambarkan pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan;

#### **D. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka

Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 241);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 124 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

#### **E. Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 95 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023 . Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten

Bangka Tengah Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## **1. Visi**

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Bangka Tengah dengan potensi, keragaman dan kompleksitas

Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 adalah:

***“MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGKA TENGAH YANG SEMAKIN UNGGUL”.***

## **2. Misi**

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kab. Bangka Tengah Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkualitas berlandaskan IMTAQ;
- 2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang unggul dan berkelanjutan melalui penguasaan dan pengembangan IPTEK;
- 3) Meningkatkan sarana dan prasana publik yang unggul merata;
- 4) Mewujudkan lingkungan yang unggul dan berkelanjutan; dan
- 5) Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan unggul.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja mengacu pada Misi ke-2, yaitu :

“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang unggul dan berkelanjutan melalui penguasaan dan pengembangan IPTEK”.

Dan misi ke-5, yaitu:

“Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan unggul”.

## **3. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang

telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 sebanyak 3 tujuan dan 5 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan**  
**Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah**

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja			Rasio Penduduk yang bekerja	94,97%	95,16%	96,02%	96,03%	96,04%	96,04%
		1.1	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	37%	65,97%	81,57%	81,80%	82,00%	82,50%
		1.2	Menurunnya pemutusan hubungan kerja	Tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK)	1,56%	0,26%	0,25%	0,20%	0,15%	0,12%
2	Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam menarik investor dalam pengembangan Usaha			Rasio Pertumbuhan Investor Penanaman Modal	1%	1%	1,39%	2,74%	4,00%	5,13%

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		2.1	Meningkatnya investasi di Kabupaten Bangka Tengah	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal	2%	5%	30%	30,50%	31%	31,50%
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan perangkat daerah	88,66	88,80	90,00	90,10	90,20	90,30
		3.1	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan	88,66	88,80	90,00	90,10	90,20	90,30
		3.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja di Organisasi DPMPK	78,50	80,50	80,50	80,70	81,00	81,50

*Sumber : Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja periode 2021-2026*

#### 4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja**  
**Kabupaten Bangka Tengah**

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	1.1.	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	-	$\frac{\text{Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar}} \times 100\%$	Sumber data Tenaga Kerja
2	Menurunnya pemutusan hubungan kerja	2.1	Tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK)	%	-	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja yang di PHK}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \times 100\%$	Sumber data Tenaga Kerja
3	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Bangka Tengah	3.1	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal	%	-	$\frac{\text{Nilai realisasi PM tahun n- realisasi tahun (n-1)}}{\text{Nilai realisasi PM tahun n-1}} \times 100 \%$	Laporan pendataan penanaman modal
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan	Index	-	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai Tertimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

*Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2024*

No	Indikator Kinerja Utama	Target				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	65,97%	81,57%	81,80%	82,00%	82,50%
2	Tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK)	0,26%	0,25%	0,20%	0,15%	0,12%
3	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal	5%	30%	30,50%	31%	31,50%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan	88,80	90,00	90,10	90,20	90,30

*Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2024*



## B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2024:

**Tabel 2.3**

### **Rencana Kinerja Tahun 2024**

#### **Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan**

#### **Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah**

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan daya saing tenaga kerja	1	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	81,80
		2	Menurunnya pemutusan hubungan kerja	Tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK)	%	0,20
2	Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam menarik investor dalam pengembangan	1	Meningkatnya investasi di Kabupaten Bangka Tengah	Kenaikan Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal	%	30,5

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	usaha					
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan	Indeks	90,10
		2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja di Organisasi DPMPK	Nilai	80,7

*Sumber : Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Bangka Tengah tahun 2024*

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan

Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 01 bulan Januari tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1.	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	1.1.	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	81,80
2.	Menurunnya pemutusan hubungan kerja	2.1	Tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK)	%	0,20
3.	Meningkatnya investasi di Kabupaten Bangka Tengah	3.1	Kenaikan Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal	%	30,50
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan	Indeks	90,10
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	5.1	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja di Organisasi DPMPK	Indeks	80,70

*Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2024*

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja:

**Tabel 2.5**

**Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan  
Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2024**

NO .	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	<b>Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>Pencari Kerja yang Berkompeten</b>	<b>26,14%</b>	<b>11.120.000</b>
	<b>Keg Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Pencari Kerja yang Bersertifikat</b>	<b>230 Orang</b>	<b>11.120.000</b>
	Sub Keg Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	230 Orang	11.120.000
2.	<b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>	<b>Persentase Lowongan kerja Terhadap Pencari Kerja yang Terdaftar</b>	<b>37,50%</b>	<b>28.820.000</b>
	<b>Keg Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar AK 1</b>	<b>880 Pencari Kerja</b>	<b>28.820.000</b>
	Sub Keg Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	880 Orang	28.820.000
3.	<b>Program Hubungan Industrial</b>	<b>Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial (HI) yang Diselesaikan</b>	<b>100%</b>	<b>31.820.000</b>
	<b>Keg Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Perusahaan yang Memiliki PP dan PKB</b>	<b>73,99%</b>	<b>9.820.000</b>
	Sub Keg Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	12 Perusahaan	9.820.000
	Sub Keg Penyelenggaraan	Jumlah Data dan Informasi	1 Laporan	5.320.000

NO .	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	Pendataan Dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta pengupahan	Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		
	<b>Keg Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Perusahaan yang Mematuhi Peraturan Ketenagakerjaan</b>	<b>80,68%</b>	<b>16.680.000</b>
	Sub Keg Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	8 Perkara	16.680.000
<b>4.</b>	<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	<b>Jumlah Investor Penanaman Modal</b>	<b>75 Investor</b>	<b>30.000.000</b>
	<b>Keg Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Investor yang Berencana Berinvestasi di Kabupaten Bangka Tengah</b>	<b>165 Investor</b>	<b>30.000.000</b>
	Sub Keg Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	30.000.000
<b>5.</b>	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>Persentase Perusahaan yang Patuh Menyampaikan Laporan</b>	<b>19,48%</b>	<b>587.674.000</b>
	<b>Keg Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Perusahaan yang patuh Menyampaikan Laporan</b>	<b>75 Perusahaan</b>	<b>587.674.000</b>
	Sub Keg Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahannya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahannya	9 Kegiatan Usaha	88.151.000
	Sub Keg Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	257 Pelaku Usaha	323.222.000

NO .	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	Sub Keg Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa, Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	16 Kegiatan Usaha	176.301.000
6.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Izin yang Dikeluarkan dan Terverifikasi Tepat Waktu (Sesuai SOP)	100%	81.172.000
	Keg Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Izin yang Diterbitkan	5550 Izin	81.172.000
	Sub Keg Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5550 Pelaku Usaha	61.156.000
	Sub Keg Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	250 Kegiatan Usaha	20.016.000
8.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rata-rata Hari Penyelesaian Pelayanan Perizinan	5 hari	30.020.000
	Keg Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Hari Penyelesaian Pelayanan Perizinan	5 hari	30.020.000
	Sub Keg Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	30.020.000

NO .	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
9.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pelayanan Penunjang Urusan OPD sesuai Tupoksinya</b>	<b>100%</b>	<b>4.550.746.000</b>
	<b>Keg Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>20.000.000</b>
	Sub Keg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	15.000.000
	Sub Keg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.000.000
	<b>Keg Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselenggara dengan Baik</b>	<b>100%</b>	<b>3.110.000.000</b>
	Sub Keg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang	3.100.000.000
	Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000
	Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	1 Laporan	5.000.000
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tersediannya Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>10.000.000</b>
	Sub Keg Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.000.000
	Sub Keg Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.000.000
	<b>Keg Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tersediannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>41.650.000</b>
	Sub Keg Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	21.030.000

NO .	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARA N
1	2	3	4	5
	Sub Keg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	8 Orang	20.620.000
	<b>Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>220.400.000</b>
	Sub Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.000.000
	Sub Keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	36.000.000
	Sub Keg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	36.000.000
	Sub Keg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	42.400.000
	Sub Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43 Laporan	100.000.000
	<b>Keg Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>85 %</b>	<b>581.296.000</b>
	Sub Keg Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	111 Unit	205.749.000
	Sub Keg Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	78 Unit	375.547.000
	<b>Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>339.540.000</b>
	Sub Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	118.080.000
	Sub Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	126.000.000
	Sub Keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	95.460.000
	<b>Keg Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>227.860.000</b>
	Sub Keg Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan	1 Unit	71.470.000



NO .	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARA N
1	2	3	4	5
	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
	Sub Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	108.090.000
	Sub Keg Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	34.300.000
	Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	14.000.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
4. Pada perubahan PK Tahun 2024, Target Kenaikan Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal mengalami Penurunan dari 30,5% menjadi 2,5% Pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 dikarenakan:
  - a. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2024, Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal baru mencapai 413.789.610.154,052 sedangkan target Perjanjian Kinerja (PK) Induk sebesar 30,50% atau Nilai realisasi investasi minimal mencapai 1,52 Trilyun.
  - b. Pengaruh besar isu pertambangan dengan kasus yang lagi viral di Bangka Belitung, sehingga Perusahaan yang aktivitas kegiatan usaha nya di

bidang itu belum berani berekspansi luas dengan kondisi pertimahan di babel yang masih lesu.

- c. Tambak-tambak udang yang ada di bangka Tengah masih banyak yang gagal panen pengaruh penyakit yang menyerang udang vaname.
- d. Tidak beroperasinya 2 pabrik CVO yang ada di Bangka Tengah sehingga tidak ada perputaran uang dari aktivitas usaha tersebut yang berdampak para petani sawit menjual nya ke luar Bangka Tengah

Pada tanggal 15 bulan Oktober tahun 2024 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan adanya penyesuaian target kinerja yang sampai triwulan II masih jauh dari capaian kinerja yang ditetapkan sehingga target sebelumnya dilakukan perubahan dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.6**

**Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1.	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	1.1.	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	81,80
2.	Menurunnya pemutusan hubungan kerja	2.1	Tingkat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	%	0,20
3.	Meningkatnya investasi di Kabupaten Bangka Tengah	3.1	Kenaikan Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal	%	2,5
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan	Indeks	90,10
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	5.1	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja di Organisasi DPMPK	Indeks	80,70

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2024

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 2.7**  
**Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan**  
**Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2024**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	<b>Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>Pencari kerja yang Berkompeten</b>	<b>26,14%</b>	<b>11.120.000</b>
	<b>Keg Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Pencari kerja yang bersertifikat</b>	<b>230 Orang</b>	<b>11.120.000</b>
	Sub Keg Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	230 Orang	11.120.000
2.	<b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>	<b>Persentase Lowongan kerja terhadap pencari kerja yang terdaftar</b>	<b>37,50%</b>	<b>28.820.000</b>
	<b>Keg Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Jumlah pencari kerja yang terdaftar AK 1</b>	<b>880 Pencari Kerja</b>	<b>28.820.000</b>
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (Karir Hub)	880 Orang	28.820.000
3.	<b>Program Hubungan Industrial</b>	<b>Persentase kasus perselisihan Hubungan Industrial (HI) yang diselesaikan</b>	<b>100%</b>	<b>31.820.000</b>
	<b>Keg Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Perusahaan yang memiliki PP dan PKB</b>	<b>73,99%</b>	<b>15.140.000</b>
	Sub Keg Pengesahan peraturan perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	12 Perusahaan	9.820.000
	Sub Keg Penyelenggaraan Pendataan Dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	1 Laporan	5.320.000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	<b>Keg Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase perusahaan yang mematuhi peraturan ketenagakerjaan</b>	<b>80,68%</b>	<b>16.680.000</b>
	Sub Keg Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industria, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	8 Perkara	16.680.000
<b>4.</b>	<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	<b>Jumlah Investor Penanaman Modal</b>	<b>75 Investor</b>	<b>30.000.000</b>
	<b>Keg Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Investor yang berencana berinvestasi di Kabupaten Bangka Tengah</b>	<b>165 Investor</b>	<b>30.000.000</b>
	Sub Keg Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	1 dokumen	30.000.000
<b>5.</b>	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>Persentase perusahaan yang patuh menyampaikan laporan</b>	<b>19,48%</b>	<b>587.674.000</b>
	<b>Keg Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Perusahaan yang patuh menyampaikan laporan</b>	<b>75 Perusahaan</b>	<b>587.674.000</b>
	Sub Keg Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	9 Kegiatan Usaha	88.151.000
	Sub Keg Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	257 Pelaku Usaha	430.572.000
	Sub Keg Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan	16 Kegiatan Usaha	68.951.000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
		perizinan berusaha		
7.	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>Persentase Izin yang dikeluarkan dan terverifikasi tepat waktu (sesuai SOP)</b>	<b>100%</b>	<b>67.108.000</b>
	<b>Keg Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Izin yang diterbitkan</b>	<b>5500 Izin</b>	<b>67.108.000</b>
	Sub Keg Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui system perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	5500 Pelaku Usaha	38.092.000
	Sub Keg Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	250 Kegiatan Usaha	29.016.000
8.	<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	<b>Rata-rata hari penyelesaian pelayanan perizinan</b>	<b>5 hari</b>	<b>29.092.000</b>
	<b>Keg Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rata-rata hari penyelesaian pelayanan perizinan</b>	<b>5 Hari</b>	<b>29.092.000</b>
	Sub Keg Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji, dan dimanfaatkan	1 dokumen	29.092.000
9.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase pelayanan penunjang urusan OPD sesuai tupoksinya</b>	<b>100%</b>	<b>4.512.274.000</b>
	<b>Keg Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>20.000.000</b>
	Sub Keg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dokumen	15.000.000
	Sub Keg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan	5.000.000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	<b>Keg Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terselenggara dengan baik</b>	<b>100%</b>	<b>3.232.214.000</b>
	Sub Keg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25 Orang	3.222.214.000
	Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000
	Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	1 Laporan	5.000.000
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tersediannya laporan barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>10.000.000</b>
	Sub Keg Pembinaan, Pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.000.000
	Sub Keg Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.000.000
	<b>Keg Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tersediannya administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>28.040.000</b>
	Sub Keg Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	7.420.000
	Sub Keg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	8 Orang	20.620.000
	<b>Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>218.400.000</b>
	Sub Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	6.000.000
	Sub Keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket	36.000.000
	Sub Keg Penyediaan Bahan	Jumlah paket bahan logistik	12 Paket	36.000.000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	Logistik Kantor	kantor yang disediakan		
	Sub Keg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	40.400.000
	Sub Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	43 Laporan	100.000.000
	<b>Keg Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah</b>	<b>80%</b>	<b>480.464.000</b>
	Sub Keg Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	111 Unit	205.749.000
	Sub Keg Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	78 Unit	274.715.000
	<b>Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>296.224.000</b>
	Sub Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	99.548.000
	Sub Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	104.000.000
	Sub Keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	92.676.000
	<b>Keg Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>226.932.000</b>
	Sub Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	70.542.000
	Sub Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	3 Unit	108.090.000
	Sub Keg Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	35 Unit	34.300.000
	Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	14.000.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu



atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator sasaran apakah melebihi target atau tidak mencapai target, digunakan skala pengukuran dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Inteval Nilai Realisasi Kinerja	Kategori Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja.

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Organisasi yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Dengan kata lain Capaian Kinerja Organisasi digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Organisasi, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

#### **Capaian Indikator Kinerja Sasaran**

#### **Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2024**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	81,80%	49,74%	60,79%	Rendah	Bidang Tenaga Kerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
2	Menurunnya pemutusan hubungan kerja	Tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK)	0,20%	9,45%	-4650%	Sangat Rendah	Bidang Tenaga Kerja
3	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Bangka Tengah	Kenaikan Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal	2,50%	-51,66%	-2068%	Sangat Rendah	Bidang Penanaman Modal
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan	90,10	90,46	100%	Sangat Tinggi	SKM
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja di Organisasi DPMPTK	80,70	76,54	94,85%	Sangat Tinggi	Nilai Evaluasi Inspektorat

Sumber: Data Realisasi Kinerja DPMPTK

Uraian penjelasan tabel :

- Persentase pencari kerja yang ditempatkan sebesar 49,74% dengan perhitungan:

$$\frac{\text{Pencari Kerja yang ditempatkan}}{\text{Pencari Kerja yang Terdaftar}} \times 100\%$$

$$\frac{287}{557} \times 100\% = 49,74 \%$$

Nilai Realisasi ini tidak mencapai target dikarenakan Pengaruh besar isu pertambangan dengan kasus yang lagi viral di Bangka Belitung yang mengakibatkan perekonomian di Kabupaten Bangka Tengah mengalami penurunan serta lowongan kerja yang terbatas dan lowongan kerja yang tidak sesuai keahlian dan keterampilan para pencari kerja.

Faktor pendukung pencapaian target adalah:

Adanya petugas operator bursa kerja online dalam menggali informasi kepada pencari kerja (bekerja, wirausaha dan masih mencari kerja), Adanya Program Pembinaan Ketenagakerjaan Bantuan Tenaga Kerja Mandiri Pemula/Perluasan Kesempatan Kerja Bidang Tenaga Kerja Mandiri Pemula kepada masyarakat Kabupaten Bangka Tengah dan bantuan usaha pasca pelatihan. Penempatan tenaga kerja tahun 2024 juga dipengaruhi oleh Program Padat Karya, Perdagangan besar dan eceran, P3K, Hotel, Usaha, dan Tenaga Kerja Mandiri.

Hambatan dan Kendala:

Adanya lowongan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kompetensi para pencari kerja

Solusi dan Strategi pada tahun berikutnya:

1. Memperbanyak pelatihan bagi pencari kerja sesuai kebutuhan pasar kerja.
  2. Melakukan MOU dengan BLK-BLK yang melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi.
  3. Adanya kerjasama dengan perusahaan agar menyebarkan lowongan kerja melalui DPMPTK.
  4. Penyebarluasan info bursa kerja dilakukan melalui langsung dan online.
6. Tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) mempunyai target 0,20% dan terealisasi 9,45% dengan perhitungan:

$$\frac{\text{Tenaga Kerja yang di PHK}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \times 100\%$$

$$\frac{744}{7872} \times 100\% = 9,45\%$$

Semakin kecil jumlah tenaga kerja yang di PHK, maka capaian kinerja akan semakin baik. Berdasarkan angka diatas, dapat dilihat bahwa realisasi Tingkat Pemutusan Hubungan Kerja cukup tinggi dan jauh dari capaian target yang ditetapkan dikarenakan terdapat beberapa perusahaan di Kabupaten Bangka Tengah saat ini tidak melanjutkan/tidak beroperasi yang

mengakibatkan peningkatan yang signifikan terhadap pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kerja.

Faktor pendukung pencapaian target adalah:

1. Adanya Pembinaan dan sosialisasi kepada perusahaan tentang perlunya memenuhi sarana hubungan industrial pada Perusahaan;
2. Pendampingan kepada tenaga kerja dan perusahaan yang terlibat perselisihan hubungan industrial agar dapat diselesaikan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan.

Hambatan dan Kendala:

Kondisi perusahaan yang masih pada tahap pemulihan ekonomi mengakibatkan adanya pengurangan pekerja pada perusahaan tersebut.

Solusi dan Strategi pada tahun berikutnya:

1. Terus melakukan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan, sehingga perusahaan tersebut mematuhi aturan ketenagakerjaan.
  2. Melakukan sosialisasi terhadap perusahaan dan tenaga kerja tentang perubahan-perubahan terkait peraturan ketenagakerjaan.
  3. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial agar tidak saling merugikan antara pekerja dan perusahaan.
7. Target Kenaikan Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal mengalami Penurunan dari 30,5% menjadi 2,5% Pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 dikarenakan:
- a. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2024, Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal baru mencapai 413.789.610.154,052 sedangkan target Perjanjian Kinerja (PK) Induk sebesar 30,50% atau Nilai realisasi investasi minimal mencapai 1,52 Trilyun.
  - b. Pengaruh besar isu pertambangan dengan kasus yang lagi viral di Bangka Belitung, sehingga Perusahaan yang aktivitas kegiatan usahanya di bidang itu belum berani berekspansi luas dengan kondisi pertambangan di Babel yang masih lesu.

- c. Tambak-tambak udang yang ada di bangka Tengah masih banyak yang gagal panen pengaruh penyakit yang menyerang udang vaname.
- d. Tidak beroperasinya 2 pabrik CVO yang ada di Bangka Tengah sehingga tidak ada perputaran uang dari aktivitas usaha tersebut yang berdampak para petani sawit menjual nya ke luar Bangka Tengah.

Indikator kinerja Kenaikan Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal mempunyai target sebesar 2,50% dan terealisasi sebesar -51,66% dengan capaian kinerja 0% berdasarkan perhitungan kenaikan nilai realisasi investasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai realisasi Investasi PM tahun } n - \text{Nilai realisasi Investasi PM tahun } n-1}{\text{Nilai realisasi Investasi PM tahun } n-1} \times 100\%$$

$$\frac{563.905.274.850,052 - 1.166.523.578.699,08}{1.166.523.578.699,08} \times 100\% = -51,66\%$$

Berdasarkan perhitungan realisasi diatas, Kenaikan nilai realisasi investasi penanaman modal tahun 2024 tidak mencapai target dikarenakan:

1. Masih ada perusahaan-perusahaan yang belum menyampaikan laporan perkembangan penanaman modal (LKPM);
2. Masih ada perusahaan yang belum menjalankan usahanya dikarenakan baru terbit NIB nya saja, sedangkan kelengkapan izin lainnya masih dalam proses seperti izin AMDAL atau IUP;
3. Masih rendahnya minat calon investor untuk berinvestasi, karena Banyak lahan yang berstatus Hutan Lindung;
4. Tanggal masa pelaporan yang terbatas, sedangkan rekapakan keuangan belum selesai dikeluarkan pihak akunting, sehingga admin yang berkewajiban tidak bisa menyampaikan laporan LKPM nya karena sudah lewat dari tanggal pelaporan;
5. Promosi Invetasi yang belum optimal;

Sektor Usaha yang mempengaruhi kenaikan nilai realisasi investasi adalah sebagai berikut:

- Hotel dan Restoran sebesar 81.674.259.044 (14,48%).

- Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya sebesar 90.000.000 (0,02%).
- Industri Kertas dan Percetakan sebesar 200.000 (0,00%).
- Industri Kimia dan Farmasi sebesar 0 (0,00%).
- Industri Lainnya sebesar 337.500.201 (0,06%).
- Jasa Lainnya sebesar 31.891.273.653 (5,66%).
- Konstruksi sebesar 7.595.881.949 (1,35%).
- Listrik, Gas dan Air sebesar 645.700.000 (0,11%).
- Perdagangan dan Reparasi sebesar 120.039.708.408 (21,29%).
- Perikanan sebesar 17.308.733.379 (3,07%).
- Industri Makanan sebesar 91.940.095.454 (16,30%).
- Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan sebesar 66.857.221.018 (11,86%).
- Pertambangan sebesar 38.094.430.217 (6,76%).
- Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran sebesar 8.961.250.000 (1,59%).
- Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi sebesar 98.469.021.527 (17,46%).

#### Hambatan dan Kendala:

1. Dari perusahaan yang terdata, belum semua perusahaan yang menyampaikan Laporan Perkembangan Penanaman Modalnya (LKPM).
2. Masih terdapat pelaku usaha yang belum melaporkan LKPM tepat waktu.
3. Pengisian LKPM yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada.
4. banyak lahan yang berstatus Hutan Lindung.
5. Promosi investasi yang belum optimal.

#### Solusi dan Strategi pada tahun berikutnya:

1. Melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang telah terdaftar di sistem OSS.
2. Melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang LKPM.

3. Menyusun kajian potensi dan peluang investasi secara detail dan terperinci serta Bekerjasama dengan pihak-pihak dan instansi terkait dalam mendukung penyiapan lahan, sarana dan prasarana memadai dalam upaya pengembangan potensi investasi
  4. Mengikuti Pameran Investasi serta melakukan promosi melalui sistem, web, video dan media strategis lainnya.
8. Indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan. Dalam penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat pengguna layanan. Secara umum kualitas pelayanan perizinan pada DPMPTK Kab. Bangka Tengah Tahun 2024 dipersepsikan SANGAT BAIK oleh masyarakat pengguna layanan. Pada Tahun 2024, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan mempunyai target nilai 90,10 dengan kategori sangat baik dan terealisasi dengan nilai 90,46 atau persentase capaian 100,40%. Pencapaian tersebut dapat melebihi target dikarenakan adanya pelaksanaan pendampingan dan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik kepada Masyarakat dan pelaku usaha yang belum memahami proses perizinan terutama perizinan melalui sistem OSS adanya komitmen para petugas pelayanan yang mampu memberikan layanan secara baik dan sesuai aturan. Pada Tahun 2024 juga telah diresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bangka Tengah di Kecamatan Pangkalanbaru sebagai sarana untuk memudahkan masyarakat melakukan proses perizinan sehingga dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin melakukan proses perizinan terutama bagi masyarakat atau pelaku usaha di daerah Kecamatan Pangkalanbaru. Berikut rata-rata nilai unsur pelayanan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.3.**  
**Data SKM DPMPTK**

Kode Unsur	Unsur	Rata-rata	Index
A	Persyaratan pelayanan	3,51	87,66
B	Sistem, mekanisme, prosedur	3,53	88,15



C	Waktu penyelesaian pelayanan	3,49	87,34
D	Biaya/ Tarif	3,67	91,72
E	Produk/ hasil layanan	3,55	88,80
F	Kompetensi pelaksana	3,57	89,29
G	Perilaku pelaksana	3,64	90,91
H	Sarana dan Prasarana	3,71	92,86
I	Penanganan Pengaduan	3,90	97,40
Jumlah Unsur Digunakan :		9,00	
<b>Total</b>		<b>3,62</b>	<b>90,46</b>

*Sumber: Laporan SKM DPMPTK Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024*

#### Hambatan dan Kendala:

1. Masih adanya pelaku usaha yang belum memahami proses penerbitan izin terutama perizinan yang diproses melalui sistem OSS.
2. Kompetensi pelaksana layanan yang belum optimal.

#### Solusi dan Strategi pada tahun berikutnya:

1. Melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha tentang aturan serta proses pemberian NIB dan izin usaha melalui OSS sesuai ketentuan dan peraturan.
  2. Melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha dalam proses pembuatan NIB dan Izin Usaha melalui sistem OSS.
  3. Mengikuti Bimtek dan Diklat terutama bagi pelaksana layanan.
9. Indikator Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja DPMPTK, Pada tahun 2024 target Indikator Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja DPMPTK sebesar 80,7 0, berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja DPMPTK pada tahun 2024 sebesar 76,54. Berdasarkan hal tersebut Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja DPMPTK Pada Tahun 2024 belum mencapai target, dengan beberapa rekomendasi dari Inspektorat yaitu:
11. Memperbaiki Cascading yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/ Hasil yang akan dicapai

di setiap level jabatan (sampai ke staf/pelaksana /jabatan fungsional/ operasional).

12. Membuat Crosscutting yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan.
13. Meningkatkan komitmen seluruh pegawai untuk memahami dan peduli terhadap kinerja yang telah direncanakan.
14. Mendokumentasikan keterlibatan pimpinan sebagai pengambil keputusan (Decision Maker).
15. Meningkatkan komitmen seluruh pegawai untuk memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
16. Membuat penjelasan dan analisa perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional (Benchmark Kinerja) pada laporan kinerja.
17. Mendokumentasikan keterlibatan pimpinan dalam penyajian informasi pada laporan akuntabilitas kinerja.
18. Meningkatkan komitmen seluruh pegawai atas penyajian informasi dalam laporan kinerja.
19. Membuat evaluasi akuntabilitas kinerja (evaluasi rencana aksi) pada seluruh unit kerja secara berjenjang.
20. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dengan membuat matrik rencana aksi tindaklanjut, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar perbaikan dokumen perencanaan tahun selanjutnya.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, telah dilakukan penyesuaian dan perbaikan-perbaikan akuntabilitas kinerja pada tahun 2024 sehingga akuntabilitas kinerja tersebut dapat terus ditingkatkan.

Hambatan dan Kendala:

1. Pengumpulan data yang dilakukan oleh bidang-bidang terkait masih menunggu data yang dikeluarkan oleh pusat.

2. Perubahan metode dan bahan yang harus disiapkan dalam pelaksanaan evaluasi.

Solusi dan Strategi pada tahun berikutnya:

1. Melakukan koordinasi ke bidang-bidang terkait agar menyiapkan data secara akurat dan melakukan pengecekan berkala terhadap data yang dikeluarkan oleh Pusat.
2. Koordinasi secara berkala dengan tim evaluasi Akuntabilitas Kinerja tentang metode dan bahan yang disiapkan dalam proses evaluasi.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Capaian Kinerja**

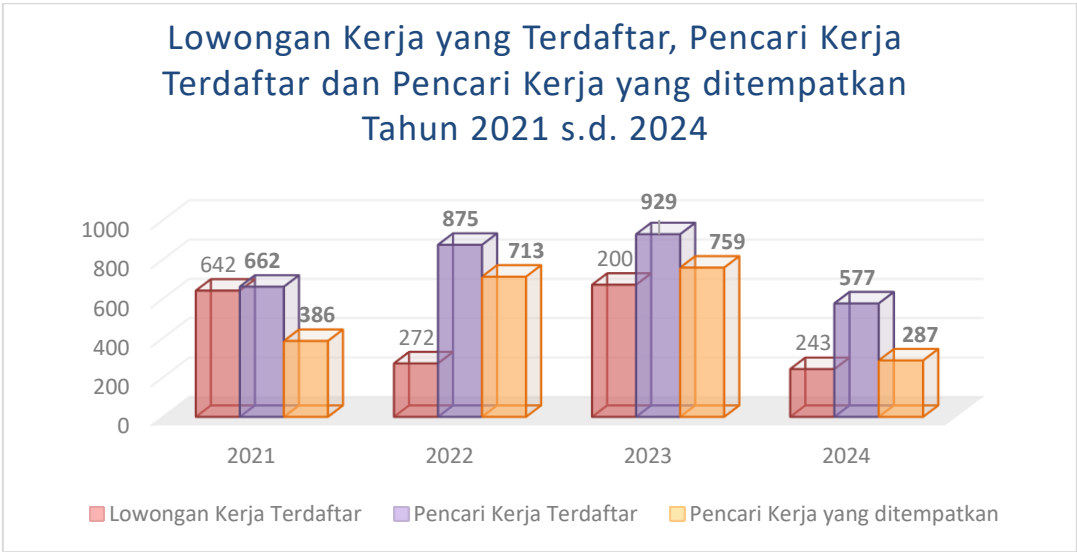
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	37 %	58,31 %	157,59 %	65,97 %	81,49%	123,52%	81,57%	81,70%	100,16%	81,80%	49,74%	60,79
2	Menurunnya pemutusan hubungan kerja	Tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK)	1,56 %	0,57 %	273,68 %	0,26 %	0,40%	65,35%	0,25%	0,02%	117%	0,20%	9,45%	-4650
3	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Bangka Tengah	Kenaikan Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal	2%	69,59%	3479 %	5 %	53,34%	1066%	30%	2%	6,67%	2,50%	-51,66%	-2068
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan	88,66	89,9	100,3	88,80	89,97	101,31	90	89,73	99,70	90,10	90,46	100,40
5	Meningkatnya Akuntabilitas	Nilai evaluasi	78,50	78,04	99,41%	80,50	78,05	96,95%	80,50	78,05	96,96%	80,70	76,54	94,85

	bilitas Kinerja Perang kat Daerah	akunta bilitas kinerja di Organi sasi DPMP TK												
--	-----------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Data Realisasi Kinerja DPMP TK

Uraian penjelasan tabel :

➤ Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja.



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 s.d. 2024 jumlah pencari kerja yang terdaftar dan pencari kerja yang ditempatkan mengalami kenaikan, sehingga berdasarkan realisasi tersebut, persentase pencari kerja yang ditempatkan mengalami kenaikan dari tahun 2021 s.d. 2023 dan mengalami penurunan pada tahun 2024. Perhitungan persentase pencari kerja yang ditempatkan di dapat dari jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar dikali 100%. Pada tahun 2021, Indikator persentase pencari kerja yang ditempatkan mempunyai target 37% dan terealisasi 58,31% sedangkan pada tahun 2022, mempunyai target 65,97% dan realisasi 81,49% dengan nilai capaian 123,52%, dan pada tahun 2023 mempunyai target 81,57% dan realisasi 81,70% dengan nilai capaian 100,16% serta pada tahun 2024 mempunyai target 81,80% dan realisasi 49,74% dengan nilai capaian 100,16%.

➤ Menurunnya pemutusan hubungan kerja.



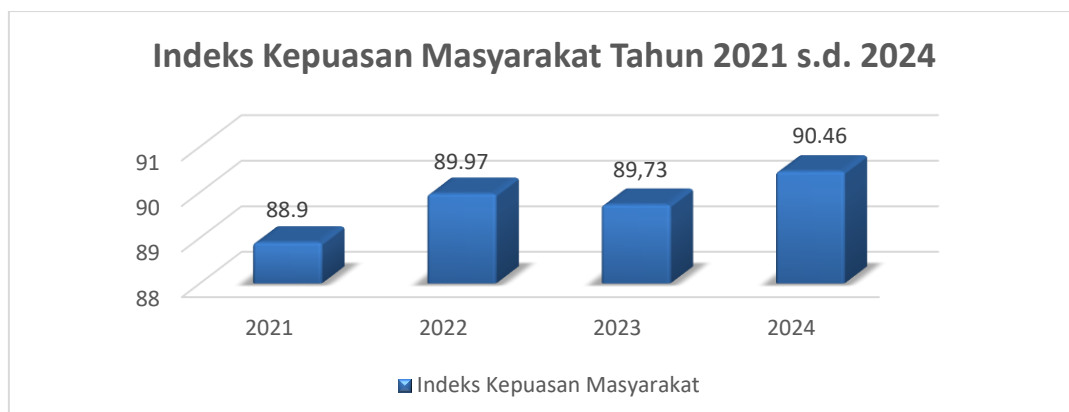
Pada tahun 2021 Indikator Tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) mempunyai target 1,56% dan terealisasi 0,57% sedangkan pada tahun 2022 Indikator Tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) mempunyai target 0,26% dan realisasi 0,40% dengan nilai capaian 65,35%, dan pada tahun 2023 mempunyai target 0,25% dan realisasi 0,02% dengan nilai capaian 117% serta pada tahun 2024 mempunyai target 0,20% dan realisasi 9,45% dengan nilai capaian -4650% berdasarkan perhitungan jumlah tenaga kerja yang di PHK dibagi jumlah tenaga kerja dikali 100%. Semakin sedikit tenaga kerja yang di PHK, maka kinerja akan semakin baik, sehingga berdasarkan grafik jumlah tenaga kerja yang di PHK terlihat bahwa kinerja yang semakin baik dari tahun 2021 s.d. 2023. Akan tetapi, pada tahun 2024 jumlah tenaga kerja yang di PHK mengalami kenaikan yang signifikan diakibatkan beberapa perusahaan di Kabupaten Bangka Tengah saat ini tidak melanjutkan/tidak beroperasi.

- Meningkatnya Investasi di Kabupaten Bangka Tengah.



Berdasarkan grafik diatas, nilai realisasi investasi mengalami kenaikan pada tahun 2021 s.d. 2023. Akan tetapi, kenaikan nilai realisasi investasi pada tahun 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 30%. Perhitungan kenaikan nilai realisasi investasi merupakan perhitungan dari Nilai realisasi investasi tahun berjalan dikurangi tahun sebelumnya dibagi nilai realisasi investasi tahun sebelumnya dikali 100%. Pada tahun 2021 Indikator Kenaikan Nilai Realisasi Penanaman Modal mempunyai target 2% dan terealisasi 69,59% sedangkan pada tahun 2022 Indikator Kenaikan Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal mempunyai target 5% dan realisasi 53,34% dengan nilai capaian 1066%, dan pada tahun 2023 mempunyai target 30% dan realisasi 2% (1,166 Trilyun) dengan nilai capaian 6,67% serta pada tahun 2024 mempunyai target 2,50% dan terealisasi -51,66% (563,90 Milyar) dengan nilai capaian 0%.

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan.



Pada tahun 2021 Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan mempunyai target 88,66 dan terealisasi 89,90 sedangkan pada tahun 2022 Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan mempunyai target 88,80 dan realisasi 89,97 dengan nilai capaian 101,3 dan pada tahun 2023 mempunyai target 90 dan realisasi 89,73 dengan nilai capaian 101,3% serta pada tahun 2024 mempunyai target 90,10 dan realisasi 90,46 dengan nilai capaian 100,40%.

➤ **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.**

Pada tahun 2021 Indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja mempunyai target 78,50 dan terealisasi 78,04 sedangkan pada tahun 2022 Indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja mempunyai target 80,50 dan realisasi 78,05, dan pada tahun 2023 mempunyai target 80,50 dan realisasi masih menggunakan realisasi tahun 2022 yaitu 78,05 serta pada tahun 2024 mempunyai target 80,70 dan terealisasi 76,54 dengan capaian 94,85%.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	49,74%	82,50%	60,29%
2	Menurunnya pemutusan hubungan kerja	Tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK)	9,45%	0,12%	-7775%
3	Meningkatnya Investasi di Kabupaten	Kenaikan Nilai Realisasi	-51,66%	31,50%	-164%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
	Bangka Tengah	Investasi Penanaman Modal			
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan	90,46	90,30	100,18%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja di Organisasi DPMPK	76,54	82,50	92,78

*Sumber: Data Realisasi Kinerja DPMPK*

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa beberapa capaian strategis sampai dengan tahun 2024 belum tercapai dan masih jauh dari pencapaian target yang ditetapkan dikarenakan adanya beberapa hambatan dan kendala terkait capaian kinerja sasaran tersebut. Dilihat dari tabel diatas, capaian yang telah mencapai target sampai dengan target akhir renstra adalah

- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dengan realisasi tahun 2024 yaitu 90,46 sedangkan target sampai dengan tahun 2026 yaitu 90,30 sehingga Tingkat kemajuan atau capaiannya sampai tahun 2024 telah melebihi target yaitu 100,18%. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pelaksanaan pendampingan dan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik kepada Masyarakat dan pelaku usaha yang belum memahami proses perizinan terutama perizinan melalui sistem OSS serta adanya komitmen para petugas pelayanan yang mampu memberikan layanan secara baik dan sesuai aturan.



Sedangkan beberapa indikator sasaran yang pada tahun 2024 belum mencapai target dan masih jauh dari capaian target sampai akhir tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dengan indikator Persentase pencari kerja yang ditempatkan dengan realisasi tahun 2024 yaitu 49,74% sedangkan target sampai dengan tahun 2026 yaitu 82,50% sehingga tingkat kemajuan atau capaiannya sampai tahun 2024 yaitu 60,29%. Berdasarkan hal tersebut, capaiannya masih belum mencapai target dan akan terus dilakukan perbaikan dan tindak lanjut agar mampu memenuhi capaian target sampai dengan tahun 2026. Beberapa Solusi dan tindak lanjut dalam mencapai target kinerja sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Memperbanyak pelatihan bagi pencari kerja sesuai kebutuhan pasar kerja.
2. Melakukan MOU dengan BLK-BLK yang melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi.
3. Adanya kerjasama dengan perusahaan agar menyebarkan lowongan kerja melalui DPMPTK.
4. Penyebarluasan info bursa kerja dilakukan melalui langsung dan online.

2. Menurunnya Pemutusan Hubungan Kerja dengan indikator Tingkat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan realisasi tahun 2024 yaitu 9,45% sedangkan target sampai dengan tahun 2026 yaitu 0,12% sehingga tingkat kemajuan atau capaiannya sampai tahun 2024 yaitu -7775%. Capaian kinerja Tingkat Pemutusan Hubungan Kerja adalah capaian kinerja yang apabila Semakin kecil jumlah tenaga kerja yang di PHK, maka capaian kinerja akan semakin baik. Berdasarkan capaian diatas, maka tingkat capaian tersebut masih jauh dari capaian target yang diinginkan sampai dengan tahun 2026, dikarenakan terdapat beberapa perusahaan di Kabupaten Bangka Tengah saat ini tidak melanjutkan/tidak beroperasi yang mengakibatkan peningkatan yang signifikan terhadap pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kerja. Beberapa Solusi dan strategi pencapaian target pada tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Terus melakukan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan, sehingga perusahaan tersebut mematuhi aturan ketenagakerjaan.
  2. Melakukan sosialisasi terhadap perusahaan dan tenaga kerja tentang perubahan-perubahan terkait peraturan ketenagakerjaan.
  3. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial agar tidak saling merugikan antara pekerja dan perusahaan.
3. Meningkatnya Investasi di Kabupaten Bangka Tengah dengan indikator Kenaikan Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal dengan realisasi tahun 2024 yaitu -51,66% sedangkan target sampai dengan tahun 2026 yaitu 31,50% sehingga tingkat kemajuan atau capaiannya sampai tahun 2024 yaitu -164%. Beberapa faktor yang mengakibatkan capaian kinerjanya minus dan bahkan masih jauh dari target yang ditetapkan sampai dengan tahun 2026 dikarenakan:
1. Masih ada perusahaan-perusahaan yang belum menyampaikan laporan perkembangan penanaman modal (LKPM);
  2. Masih ada perusahaan yang belum menjalankan usahanya dikarenakan baru terbit NIB nya saja, sedangkan kelengkapan izin lainnya masih dalam proses seperti izin AMDAL suatu IUP;
  3. Masih rendahnya minat calon investor untuk berinvestasi, karena Banyak lahan yang berstatus Hutan Lindung;
  4. Tanggal masa pelaporan yang terbatas, sedangkan rekapakan keuangan belum selesai dikeluarkan pihak akunting, sehingga admin yang berkewajiban tidak bisa menyampaikan laporan LKPM nya karena sudah lewat dari tanggal pelaporan;
  5. Promosi Invetasi yang belum optimal;

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/  
Kabupaten/Kota lain**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Bangka Tengah	Kenaikan Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal	-51,66%	20%	-258%

Pada Tahun 2024, Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bangka Tengah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sehingga kenaikan nilai realisasi investasi atau tingkat pertumbuhan investasinya mengalami -51,66%. Sedangkan standar nasional untuk pertumbuhan investasi pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, capaian pertumbuhan investasi di Kabupaten Bangka Tengah masih jauh jika dibandingkan dengan capaian nasional, sehingga dibutuhkan strategi, penyiapan potensi dan peluang investasi serta promosi dalam rangka meningkatkan investasi di Kabupaten Bangka Tengah dan mampu mencapai target investasi sesuai dengan yang ditetapkan berdasarkan standar nasional.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.7**  
**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan pada tahun berikutnya
1	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	81,80%	49,74%	60,79%	Tenaga Kerja yang tersedia adalah Adanya petugas operator bursa kerja online dalam menggali informasi kepada pencari kerja	1.Memperbanyak pelatihan bagi pencari kerja sesuai kebutuhan pasar kerja. 2.Melakukan MOU dengan BLK-BLK yang

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan pada tahun berikutnya
						(bekerja, wirausaha dan masih mencari kerja), Adanya Program Pembinaan Ketenagakerjaan Bantuan Tenaga Kerja Mandiri Pemula/Perluasan Kesempatan Kerja Bidang Tenaga Kerja Mandiri Pemula kepada masyarakat Kabupaten Bangka Tengah dan bantuan usaha pasca pelatihan.	melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi. 3. Adanya kerjasama dengan perusahaan agar menyebarkan lowongan kerja melalui DPMPTK. 4. Penyebarluasan info bursa kerja dilakukan melalui langsung dan online.
2	Menurunnya pemutusan hubungan kerja	Tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK)	0,20%	9,45%	-4650%	Terdapat beberapa perusahaan di Kabupaten Bangka Tengah saat ini tidak melanjutkan/ tidak beroperasi yang mengakibatkan peningkatan yang signifikan terhadap pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kerja	1. Terus melakukan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan, sehingga perusahaan tersebut mematuhi aturan ketenagakerjaan. 2. Adanya sosialisasi terhadap perusahaan dan tenaga kerja tentang perubahan-perubahan terkait peraturan ketenagakerjaan. 3. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial agar tidak saling merugikan antara pekerja dan perusahaan.
3	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Bangka Tengah	Kenaikan Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal	2,50%	-51,66%	-2068%	1. Masih ada perusahaan-perusahaan yang belum menyampaikan laporan perkembangan	1. Melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang telah terdaftar di sistem OSS. 2. Melakukan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan pada tahun berikutnya
						<p>penanaman modal (LKPM);</p> <p>2. Masih ada perusahaan yang belum menjalankan usahanya dikarenakan baru terbit NIB nya saja, sedangkan kelengkapan izin lainnya masih dalam proses seperti izin AMDAL atau IUP;</p> <p>3. Masih rendahnya minat calon investor untuk berinvestasi, karena Banyak lahan yang berstatus Hutan Lindung;</p> <p>4. Tanggal masa pelaporan yang terbatas, sedangkan rekapakan keuangan belum selesai dikeluarkan pihak akunting, sehingga admin yang berkewajiban tidak bisa menyampaik laporan LKPM nya karena sudah lewat dari tanggal pelaporan;</p> <p>5. Promosi Investasi yang belum optimal;</p>	<p>pembinaan dan sosialisasi tentang LKPM.</p> <p>3. Membuat kajian potensi dan peluang investasi.</p> <p>4. Mengikuti Pameran Investasi serta melakukan promosi melalui sistem, web, video dan media strategis lainnya.</p>
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,10	90,46	100,40%	adanya pelaksanaan pendampingan	1. Masih adanya pelaku usaha yang belum

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan pada tahun berikutnya
	Perizinan	terhadap Pelayanan Perizinan				dan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik kepada Masyarakat dan pelaku usaha yang belum memahami proses perizinan terutama perizinan melalui sistem OSS adanya komitmen para petugas pelayanan yang mampu memberikan layanan secara baik dan sesuai aturan	memahami proses penerbitan izin terutama perizinan yang diproses melalui sistem OSS. 2. Kompetensi pelaksana layanan yang belum optimal. 3. Masih adanya pelaku usaha yang belum memahami proses penerbitan izin terutama perizinan yang diproses Kompetensi pelaksana layanan yang belum optimal.
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja di Organisasi DPMPK	80,70	76,54	94,85%	1. Pengumpulan data yang dilakukan oleh bidang-bidang terkait masih menunggu data yang dikeluarkan oleh pusat. 2. Perubahan metode dan bahan yang harus disiapkan dalam pelaksanaan evaluasi.	1. Melakukan koordinasi ke bidang-bidang terkait agar menyiapkan data secara akurat dan melakukan pengecekan berkala terhadap data yang dikeluarkan oleh Pusat. 2. Koordinasi secara berkala dengan tim evaluasi Akuntabilitas Kinerja tentang metode dan bahan yang disiapkan dalam proses evaluasi

Sumber: Data Realisasi Kinerja DPMPK

Uraian penjelasan tabel :

1. Nilai Realisasi Persentase pencari kerja yang ditempatkan tidak mencapai target dikarenakan Pengaruh besar isu pertambangan dengan kasus yang lagi viral di Bangka Belitung yang mengakibatkan perekonomian di Kabupaten Bangka Tengah mengalami penurunan serta lowongan kerja yang terbatas dan lowongan kerja yang tidak sesuai keahlian dan

keterampilan para pencari kerja. Sedangkan faktor yang mendukung Pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2024 dipengaruhi oleh Program Padat Karya, Perdagangan besar dan eceran, P3K, Hotel, Usaha, dan Tenaga Kerja Mandiri.

Hambatan dan Kendala:

Terdapat lowongan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kompetensi para pencari kerja

Solusi dan Strategi pada tahun berikutnya:

1. Memperbanyak pelatihan bagi pencari kerja sesuai kebutuhan pasar kerja.
  2. Melakukan MOU dengan BLK-BLK yang melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi.
  3. Adanya kerjasama dengan perusahaan agar menyebarkan lowongan kerja melalui DPMPTK.
  4. Penyebarluasan info bursa kerja dilakukan melalui langsung dan online.
4. Tingkat capaian tersebut merupakan hasil dari jumlah tenaga kerja yang di PHK sebanyak 744 orang pekerja dibagi total tenaga kerja yang sebanyak 7872 sehingga tingkat PHK sebesar 9,45%. Realisasi ini tidak mencapai target dikarenakan terdapat beberapa perusahaan di Kabupaten Bangka Tengah saat ini tidak melanjutkan/tidak beroperasi yang mengakibatkan peningkatan yang signifikan terhadap pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kerja.

Solusi dan Strategi pada tahun berikutnya:

1. Terus melakukan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan, sehingga perusahaan tersebut mematuhi aturan ketenagakerjaan.
2. Adanya sosialisasi terhadap perusahaan dan tenaga kerja tentang perubahan-perubahan terkait peraturan ketenagakerjaan.
3. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial agar tidak saling merugikan antara pekerja dan perusahaan.

3. Sektor Usaha yang mempengaruhi kenaikan nilai realisasi investasi adalah sebagai berikut:

- Hotel dan Restoran sebesar 81.674.259.044 (14,48%).
- Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya sebesar 90.000. 000 (0,02%).
- Industri Kertas dan Percetakan sebesar 200.000 (0,00%).
- Industri Kimia dan Farmasi sebesar 0 (0,00%).
- Industri Lainnya sebesar 337.500.201 (0,06%).
- Jasa Lainnya sebesar 31.891.273.653 (5,66%).
- Konstruksi sebesar 7.595.881.949 (1,35%).
- Listrik, Gas dan Air sebesar 645.700.000 (0,11%).
- Perdagangan dan Reparasi sebesar 120.039.708.408 (21,29%).
- Perikanan sebesar 17.308.733.379 (3,07%).
- Industri Makanan sebesar 91.940.095.454 (16,30%).
- Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan sebesar 66.857.221.018 (11,86%).
- Pertambangan sebesar 38.094.430.217 (6,76%).
- Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran sebesar 8.961.250.000 (1,59%).
- Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi sebesar 98.469.021.527 (17,46%).

Akan tetapi, Indikator kinerja Kenaikan Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal mempunyai target sebesar 2,50% dan terealisasi sebesar -51,66% dengan capaian kinerja -2068%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kenaikan nilai realisasi investasi penanaman modal tidak mencapai target dikarenakan:

1. Masih ada perusahaan-perusahaan yang belum menyampaikan laporan perkembangan penanaman modal (LKPM);



2. Masih ada perusahaan yang belum menjalankan usahanya dikarenakan baru terbit NIB nya saja, sedangkan kelengkapan izin lainnya masih dalam proses seperti izin AMDAL atau IUP;
3. Masih rendahnya minat calon investor untuk berinvestasi, karena Banyak lahan yang berstatus Hutan Lindung;
4. Tanggal masa pelaporan yang terbatas, sedangkan rekapakan keuangan belum selesai dikeluarkan pihak akunting, sehingga admin yang berkewajiban tidak bisa menyampaikan laporan LKPM nya karena sudah lewat dari tanggal pelaporan;
5. Promosi Invetasi yang belum optimal;

Hambatan dan Kendala:

1. Masih terdapat pelaku usaha yang belum melaporkan LKPM tepat waktu
2. Pengisian LKPM yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada.
3. Promosi investasi yang belum optimal

Solusi dan Strategi pada tahun berikutnya:

1. Melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang telah terdaftar di sistem OSS.
  2. Melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang LKPM.
  3. Membuat kajian potensi dan peluang investasi.
  4. Mengikuti Pameran Investasi serta melakukan promosi melalui sistem, web, video dan media strategis lainnya.
4. Indeks Kepuasan Masyarakat belum mencapai target dikarenakan terdapat unsur pelayanan yang terendah yaitu unsur kompetensi pelaksana.

Hambatan dan Kendala:

1. Masih adanya pelaku usaha yang belum memahami proses penerbitan izin terutama perizinan yang diproses melalui sistem OSS.
2. Kompetensi pelaksana layanan yang belum optimal.

Solusi dan Strategi pada tahun berikutnya:

1. Melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha tentang aturan serta proses pemberian NIB dan izin usaha melalui OSS sesuai ketentuan dan peraturan.
2. Melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha dalam proses pembuatan NIB dan Izin Usaha melalui sistem OSS.
3. Mengikuti Bimtek dan Diklat terutama bagi pelaksana layanan.
5. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Pada tahun 2024 target Indikator Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja DPMPTK sebesar 80,70, berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja DPMPTK pada tahun 2024 sebesar 76,54. Berdasarkan hal tersebut Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja DPMPTK Pada Tahun 2024 belum mencapai target, dengan beberapa rekomendasi dari Inspektorat yaitu:

1. Memperbaiki Cascading yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (sampai ke staf/pelaksana/jabatan fungsional/operasional);
2. Membuat Crosscutting yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan;
3. Meningkatkan komitmen seluruh pegawai untuk memahami dan peduli terhadap
4. kinerja yang telah direncanakan;
5. 4) Mendokumentasikan keterlibatan pimpinan sebagai pengambil keputusan
6. (Decision Maker);
7. 5) Meningkatkan komitmen seluruh pegawai untuk memahami dan peduli atas
8. hasil pengukuran kinerja;
9. 6) Membuat penjelasan dan analisa perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi

10. kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) pada laporan kinerja;
11. 7) Mendokumentasikan keterlibatan pimpinan dalam penyajian informasi pada
12. laporan akuntabilitas kinerja;
13. 8) Meningkatkan komitmen seluruh pegawai atas penyajian informasi dalam
14. laporan kinerja;
15. 9) Membuat evaluasi akuntabilitas kinerja (evaluasi rencana aksi) pada seluruh
16. unit kerja secara berjenjang;.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, telah dilakukan penyesuaian dan perbaikan-perbaikan akuntabilitas kinerja pada tahun 2024, sehingga akuntabilitas kinerja tersebut dapat terus ditingkatkan.

Hambatan dan Kendala:

1. Pengumpulan data yang dilakukan oleh bidang-bidang terkait masih menunggu data yang dikeluarkan oleh pusat.
2. Perubahan metode dan bahan yang harus disiapkan dalam pelaksanaan evaluasi.

Solusi dan Strategi pada tahun berikutnya:

1. Melakukan koordinasi ke bidang-bidang terkait agar menyiapkan data secara akurat dan melakukan pengecekan berkala terhadap data yang dikeluarkan oleh Pusat.
2. Koordinasi secara berkala dengan tim evaluasi Akuntabilitas Kinerja tentang metode dan bahan yang disiapkan dalam proses evaluasi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**Tabel 3.8**

### Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Faktor Pendukung	Faktor penghambat dan kendala
1	Program Pelatihan Kerja & Produktivitas Tenaga Kerja	Pencari kerja yang Berkompeten	26,14 %	57,71%	220,7 7%	Adanya kerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam peningkatan skill/keterampilan pencari kerja di Kab. Bangka Tengah	1. Kurangnya motivasi pencari kerja dalam mengikuti pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi; 2. Kurangnya adaptasi para pencari kerja terhadap Perubahan teknologi (era serba digital).
	Keg Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Pencari kerja yang bersertifikat	230 Orang	333 Orang	144,7 8%		
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Lowongan Kerja Terhadap Pencari Kerja yang Terdaftar AK 1	37,50 %	42,11%	112,2 9%	1. Adanya Penyebaran informasi lowongan kerja baik secara langsung maupun online kepada para pencari kerja; 2. Adanya saling koordinasi dari perusahaan tentang informasi lowongan kerja; 3. Adanya petugas operator dalam pelayanan Bursa Kerja Online yang memberikan informasi lowongan kerja baik secara langsung maupun online	Ketersediaan lowongan kerja yang ditawarkan perusahaan tidak sesuai dengan kompetensi pencari kerja
	Keg Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar AK 1	880 Pencari Kerja	577 Pencari Kerja	65,56 %		
3	Program Hubungan Industrial	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan	100%	100%	100%	1. Meningkatnya perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial dan perusahaan	1. Masih terdapat perusahaan yang belum memahami dan patuh terhadap

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Faktor Pendukung	Faktor penghambat dan kendala
	Keg Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang beroperasi dalam satu (1) daerah kabupaten/kota	Persentase Perusahaan yang Memiliki PP dan PKB	73,99%	79,22%	107,06%	2. Adanya pelaksanaan pembinaan dan bimbingan tentang aturan ketenagakerjaan kepada perusahaan	2. Belum optimalnya Implementasi UU Ketenagakerjaan (UU Cipta Kerja) pada perusahaan
	Keg Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota	Persentase Perusahaan yang Mematuhi Peraturan Ketenagakerjaan	80,68%	79,22%	98,19%		
4	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Penanaman Modal	75 Investor	88 Investor	117,33%	1. Tersedianya peta potensi dan peluang yang dapat ditawarkan kepada investor dan calon investor;	Kurang Optimalnya pelaksanaan promosi investasi
	Keg Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Investor yang Berencana Berinvestasi di Kabupaten Bangka Tengah	165 Investor	115 Investor	69,69%	2. Adanya promosi investasi melalui website dan media sosial; 3. Adanya Vidio potensi dan peluang investasi yang ditawarkan.	

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Faktor Pendukung	Faktor penghambat dan kendala
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan yang Patuh Menyampaikan Laporan	19,48%	14,94%	76,69 %	1. Adanya bimbingan teknis kepada pelaku usaha dan investor maupun calon investor tentang perizinan berusaha;	1. Masih terdapat perusahaan yang tidak tepat waktu dalam melaporkan LKPM;
	Keg Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Perusahaan yang Patuh Menyampaikan laporan	73 Perusahaan	88 Perusahaan	117,3 3%	2. adanya pendampingan kepada pelaku usaha dalam melaporkan LKPM nya; 3. Adanya pengawasan terhadap investor agar mematuhi peraturan tentang penanaman modal terkait kegiatan usahanya; 4. Adanya dukungan dana DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal.	2. Pengisian LKPM yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada.
6	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Izin yang dikeluarkan dan terverifikasi tepat waktu (sesuai SOP)	100%	100%	100%	1. adanya pendampingan kepada pelaku usaha dalam pelayanan perizinan; 2. Adanya program SULIZTA "Susul Izin Ketempat Anda"	Pelaku usaha yang belum memahami proses perizinan OSS
	Keg Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi	Izin yang diterbitkan	5550 Izin	7959 Izin	143,4 0%	3. Pelaksanaan pelayanan Terpadu	

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capai an	Faktor Pendukung	Faktor penghambat dan kendala
	kewenangan daerah kabupaten/kota						
7	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rata-rata hari penyelesaian pelayanan perizinan	5 Hari	5 Hari	100%	1. Pengelolaan sistem pelayanan perizinan yang terus ditingkatkan 2. Tersedianya SDM yang mampu mengelola data dan sistem perizinan	Adanya beberapa item dalam sistem yang belum terintegrasi
	Keg Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rata-rata hari penyelesaian pelayanan perizinan	5 Hari	100%	100%		
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan OPD sesuai tupoksinya	100 %	100 %	100%		
	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terselenggara dengan baik	100%	100%	100%		
	Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah pada	100%	100%	100%		

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Faktor Pendukung	Faktor penghambat dan kendala
		Perangkat Daerah					
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	88%	100%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%		
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	85%	85%	100%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%		

Sumber: Data Realisasi Kinerja DPMPTK

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian program dan kegiatan secara keseluruhan mencapai target dikarenakan semua program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 telah berdasarkan prioritas yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah sehingga persentase capaian program kegiatan hampir secara keseluruhan mencapai atau bahkan melebihi 100%. Tabel diatas juga telah menggambarkan faktor pendukung dan faktor



penghambat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 yang akan menjadi perhatian dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

## B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
**Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Program Pelatihan Kerja & Produktivitas Tenaga Kerja	11.120.000	11.119.980	99,9 %
	Keg Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	11.120.000	11.119.980	99,9 %
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	28.820.000	27.661.012	95,97 %
	Keg Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	28.820.000	27.661.012	95,97 %
3	Program Hubungan Industrial	31.820.000	31.520.000	99,05 %
	Keg Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang beroperasi dalam satu (1) daerah kabupaten/kota	15.140.000	15.040.000	99,33 %
	Keg Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota	16.680.000	16.480.000	98,80 %
4	Program Promosi Penanaman Modal	30.000.000	30.000.000	100 %
	Keg Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan	30.000.000	30.000.000	100 %

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
	daerah kabupate/kota			
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	587.674.000	450.604.072	76,67 %
	Keg Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daaerah Kabupaten/Kota	587.674.000	450.604.072	76,67 %
6	Program Pelayanan Penanaman Modal	67.108.000	66.861.772	99,63 %
	Keg Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu saat satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	67.108.000	66.861.772	99,63 %
7	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	29.092.000	28.867.492	99,22 %
	Keg Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.092.000	28.867.492	99,22 %
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.512.274.000	4.233.820.695	93,82 %
	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	20.000.000	19.117.910	95,58 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.232.214.000	3.011.109.911	93,15 %
	Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000	8.800.000	88 %
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28.040.000	23.203.472	82,75 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	218.400.000	211.288.200	96,74 %
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	480.464.000	466.640.885	97,12 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	296.224.000	278.644.798	94,06 %

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	226.932.000	215.015.519	94,74 %

Sumber: Data Realisasi Anggaran DPMPTK

### C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.10**

#### **Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %
					(Rp.)	(Rp.)	
1	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	81,80%	49,74%	60,79%	39.940.000	38.780.992	97,09 %
2	Menurunnya pemutusan hubungan kerja	0,20%	9,45%	-4650%	31.820.000	31.520.000	99,05 %
3	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Bangka Tengah	2,50%	-51,66%	-2068%	617.674.000	480.604.072	77,80 %
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	90,10	90,46	100%	96.200.000	95.529.264	99,30 %
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	80,70	76,54	94,85%	4.512.274.000	4.233.820.695	93,82 %

Sumber: Data Realisasi Kinerja dan Anggaran DPMPTK

Uraian penjelasan tabel :

1. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja, Target Indikator kinerja sebesar 81,80% dan terealisasi sebesar 49,74%, dengan capaian 60,79%. Target anggaran sebesar Rp 39.940.000, realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 38.780.992 atau 97,09%.
2. Menurunnya Pemutusan Hubungan Kerja, Target Indikator kinerja sebesar 0,20% dan terealisasi sebesar 9,45%, dengan capaian -4650%. Target anggaran

sebesar Rp 31.820.000, realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 31.520.000 atau 99,05%.

3. Meningkatnya Investasi di Kabupaten Bangka Tengah, Target Indikator kinerja sebesar 2,50% dan terealisasi sebesar -51,66%, dengan capaian -2068%. Target anggaran sebesar Rp 617.674.000, realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 480.604.072 atau 77,80%.
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan, Target Indikator kinerja sebesar 90,10 dan terealisasi sebesar 90,46 dengan capaian 99,30%. Target anggaran sebesar Rp 96.200.000, realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 95.529.264 atau 96,95%.
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, Target Indikator kinerja sebesar 80,70 dan terealisasi sebesar 76,54 dengan capaian 94,85%. Target anggaran sebesar Rp 4.512.274.000, realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 4.233.820.695 atau 93,82%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.11**

**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan**

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian
					(Rp.)	(Rp.)	
1	Program Pelatihan Kerja & Produktivitas Tenaga Kerja	26,14 %	57,71%	220,77%	11.120.000	11.119.980	99,9 %
	Keg Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	230 Orang	333 Orang	144,78%	11.120.000	11.119.980	99,9 %
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	37,50 %	42,11 %	112,29%	28.820.000	27.661.012	95,97 %
	Keg Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	880 Pencari Kerja	577 Pencari Kerja	65,56%	28.820.000	27.661.012	95,97 %
3	Program Hubungan Industrial	100%	100%	100%	31.820.000	31.520.000	99,05 %

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian
					(Rp.)	(Rp.)	
	Keg Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang beroperasi dalam satu (1) daerah kabupaten/kota	73,99%	79,22%	107,06%	15.140.000	15.040.000	99,33%
	Keg Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota	80,68%	79,22%	98,19%	16.680.000	16.480.000	98,80%
4	Program Promosi Penanaman Modal	75 Investor	88 Investor	117,33%	30.000.000	30.000.000	100%
	Keg Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	165 Investor	115 Investor	69,69%	30.000.000	30.000.000	100%
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	19,48%	14,94%	76,69%	587.674.000	450.604.072	76,67%
	Keg Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	75 Perusahaan	88 Perusahaan	117,33%	587.674.000	450.604.072	76,67%
6	Program Pelayanan Penanaman Modal	100%	100%	100%	67.108.000	66.861.772	99,63%
	Keg Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi	5550 Izin	7959 Izin	143,40%	67.108.000	66.861.772	99,63%

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian
					(Rp.)	(Rp.)	
	kewenangan daerah kabupaten/kota						
7	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	5 Hari	5 Hari	100%	29.092.000	28.867.492	99,22 %
	Keg Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	29.092.000	28.867.492	99,22 %
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100%	100%	4.512.274.000	4.233.820.695	93,82 %
	Keg Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100%	100%	20.000.000	19.117.910	95,58 %
	Keg Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	3.232.214.000	3.011.109.911	93,15 %
	Keg Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	10.000.000	8.800.000	88 %
	Keg Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	88%	88%	100%	28.040.000	23.203.472	82,75 %
	Keg Administrasi Umum Perangkat	100%	100%	100%	218.400.000	211.288.200	96,74 %

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian
					(Rp.)	(Rp.)	
	Daerah						
	Keg Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85%	85%	100%	480.464.000	466.640.885	97,12 %
	Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	296.224.000	278.644.798	94,06 %
	Keg Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	226.932.000	215.015.519	94,74 %

Sumber: Data Realisasi Kinerja dan Anggaran DPMPTK

Uraian penjelasan tabel :

### 1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pada program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja ini terdapat 1 (satu) kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran indikator kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan dengan total anggaran sebesar Rp.11.120.000,00 (Sebelas Juta Seratus Ribu Dua Puluh Ribu Rupiah) terealisasi 99,9% atau sebesar Rp. 11.119.980,00 (Sebelas Juta Seratus Ribu Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah). Pada tahun 2024, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga kerja memiliki target pencari kerja yang berkompeten sebanyak 26,14% dan terealisasi sebanyak 57,71%. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai 1 kegiatan yang terdiri dari :

#### 1.1 Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi.

Kegiatan pelatihan ini mempunyai target pencari kerja yang bersertifikat sebanyak 230 orang dan terealisasi sebanyak 333 orang. Target anggaran sebesar Rp.11.120.000,00 realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 11.119.980,00 atau 99,9%.

## **2. Program Penempatan Tenaga Kerja**

Pada program Penempatan Tenaga Kerja ini terdapat 1 (satu) kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran indikator kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan dengan total anggaran sebesar Rp.28.820.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) terealisasi 95,97% atau sebesar Rp. 27.661.012,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Belas Rupiah). Pada tahun 2024, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga kerja memiliki target persentase lowongan kerja terhadap pencari kerja yang terdaftar sebanyak 37,50% dan terealisasi sebanyak 42,11%. Program Penempatan Tenaga Kerja mempunyai 1 kegiatan yang terdiri dari :

### **2.1 Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.**

Kegiatan ini mempunyai target jumlah pencari kerja yang terdaftar AK 1 sebanyak 880 pencari kerja dan terealisasi sebanyak 577 pencari kerja. Target anggaran sebesar Rp. 28.820.000,00 realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 27.661.012,00 atau 95,97%.

## **3. Program Hubungan Industrial**

Pada program Hubungan Industrial ini terdapat 2 (dua) kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran indikator kinerja tingkat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan total anggaran sebesar Rp.31.820.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) terealisasi 99,05% atau sebesar Rp. 31.520.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Pada tahun 2024, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga kerja memiliki target persentase kasus perselisihan Hubungan Industrial (HI) yang diselesaikan sebanyak



100% dan terealisasi sebanyak 100%. Program Hubungan Industrial mempunyai 2 kegiatan yang terdiri dari :

**3.1 Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.**

Kegiatan ini mempunyai target persentase perusahaan yang memiliki PP dan PKB sebanyak 73,99% dan terealisasi sebanyak 79,22%. Target anggaran sebesar Rp. 15.140.000,00 realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 15.040.000,00 atau 99,33%.

**3.2 Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.**

Kegiatan ini mempunyai target persentase perusahaan yang mematuhi peraturan ketenagakerjaan sebanyak 80,68% dan terealisasi 79,22%. Target anggaran sebesar Rp. 16.680.000,00 realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 16.480.000,00 atau 98,80%.

**4. Program Promosi Penanaman Modal**

Pada program Promosi Penanaman Modal ini terdapat 1 (satu) kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran indikator kinerja kenaikan nilai realisasi investasi penanaman modal dengan total anggaran sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) terealisasi 100% atau sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah). Pada tahun 2024, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga kerja memiliki target jumlah investor penanaman modal sebanyak 75 investor dan terealisasi sebanyak 88 investor. Program Promosi Penanaman Modal mempunyai 1 kegiatan yang terdiri dari :

**4.1 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.**

Kegiatan ini mempunyai target investor yang berencana berinvestasi di Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 165 investor dan terealisasi sebanyak 115 investor. Target anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 30.000.000,00 atau 69,69%.

## **5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Pada program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ini terdapat 1 (satu) kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran indikator kinerja kenaikan nilai realisasi investasi penanaman modal dengan total anggaran sebesar Rp.587.674.000,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) terealisasi 76,67% atau sebesar Rp. 450.604.072,00 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Empat Ribu Tujuh Dua Rupiah). Pada tahun 2024, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga kerja memiliki target persentase perusahaan yang patuh menyampaikan laporan sebanyak 19,48% dan terealisasi sebanyak 14,94%. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai 1 kegiatan yang terdiri dari :

### **6.1 Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.**

Kegiatan ini mempunyai target jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan sebanyak 75 perusahaan dan terealisasi sebanyak 88 perusahaan. Target anggaran sebesar Rp. 587.674.000,00 realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 450.604.072,00 atau 76,67%.

## **6. Program Pelayanan Penanaman Modal**

Pada program Pelayanan Penanaman Modal ini terdapat 1 (satu) kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan dengan total anggaran sebesar Rp.67.108.000,00 (Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah) terealisasi 99,63% atau sebesar Rp. 66.861.772,00 (Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). Pada tahun 2024, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga kerja memiliki target persentase izin yang dikeluarkan dan terverifikasi tepat waktu (sesuai SOP) sebanyak 100% dan

terrealisasi sebanyak 100%. Program Pelayanan Penanaman Modal mempunyai 1 kegiatan yang terdiri dari :

**6.1 Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu**  
Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

Kegiatan ini mempunyai target Izin yang diterbitkan sebanyak 5.550 izin dan terealisasi sebanyak 7.959 izin. Target anggaran sebesar Rp. 67.108.000,00 realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 66.861.772,00 atau 99,63%.

**7. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Pada program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal ini terdapat 1 (satu) kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan dengan total anggaran sebesar Rp.29.092.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) terealisasi 99,22% atau sebesar Rp. 28.867.492,00 (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah). Pada tahun 2024, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga kerja memiliki target rata-rata hari penyelesaian pelayanan perizinan yaitu 5 hari. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai 1 kegiatan yang terdiri dari :

**7.1 Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan**  
yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

Kegiatan ini mempunyai target rata-rata hari penyelesaian pelayanan perizinan sebanyak 100% dan terealisasi sebanyak 100%. Target anggaran sebesar Rp. 29.092.000,00 realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 28.867.492,00 atau 99,22%.

**8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ini terdapat 8 (delapan) kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran indikator kinerja Indeks Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja di Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja anggaran sebesar Rp.4.512.274.000,00 (Empat Milyar Lima Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Tujuh Empat Ribu Rupiah) terealisasi 93,82% atau sebesar Rp. 4.233.820.695,00 (Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima rupiah). Pada tahun 2024, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga kerja memiliki target nilai evaluasi akuntabilitas kinerja di Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yaitu 80,70 dan terealisasi pada tahun 2023 sebesar 76,54. Realisasi ini masih menggunakan realisasi tahun 2024 karena proses evaluasi yang masih berjalan. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Penanaman Modal mempunyai 8 kegiatan yang terdiri dari :

**8.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**

Kegiatan ini mempunyai target Kinerja Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 100% dan terealisasi sebanyak 100%. Target anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 19.117.910,00 atau 95,58%.

**8.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**

Kegiatan ini mempunyai target Kinerja Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terselenggara dengan baik sebanyak 100% dan terealisasi sebanyak 100%. Target anggaran sebesar Rp. 3.232.214.000,00 realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 3.011.109.911,00 atau 93,15%.

**8.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.**

Kegiatan ini mempunyai target Kinerja Persentase tersediannya laporan barang milik daerah pada perangkat daerah sebanyak 100% dan

teralisasi sebanyak 100%. Target anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 8.800.000,00 atau 88%.

**8.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.**

Kegiatan ini mempunyai target kinerja Persentase Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebanyak 88% dan terealisasi sebanyak 88%. Target anggaran sebesar Rp. 28.040.000,00 realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 23.203.472,00 atau 82,75%.

**8.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.**

Kegiatan ini mempunyai target Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu 100% dan terealisasi sebanyak 100%. Target anggaran sebesar Rp. 218.400.000,00 realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 211.288.200,00 atau 96,74%.

**8.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**

Kegiatan ini mempunyai target Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah yaitu 85% dan terealisasi sebanyak 85%. Target anggaran sebesar Rp. 480.464.000,00 realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 466.640.885,00 atau 97,12%.

**8.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**

Kegiatan ini mempunyai target Persentase Pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu 100% dan terealisasi sebanyak 100%. Target anggaran sebesar Rp. 296.224.000,00 realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 278.644.798,00 atau 94,06%.

**8.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

Kegiatan ini mempunyai target Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yaitu 100% dan terealisasi sebanyak

100%. Target anggaran sebesar Rp. 226.932.000,00 realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 215.015.519,00 atau 94,74%.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah menetapkan sebanyak 3 tujuan, 5 sasaran dengan 5 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja, dengan Target Indikator kinerja Persentase pencari kerja yang ditempatkan sebesar 81,80% dan terealisasi sebesar 49,74%, dengan capaian 60,79%. Target anggaran sebesar Rp 39.940.000, realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 38.780.992 atau 97,09%.
2. Sasaran Menurunnya Pemutusan Hubungan Kerja, dengan Target Indikator kinerja Tingkat Pemutusan Hubungan Kerja sebesar 0,20% dan terealisasi

sebesar 9,45%, dengan capaian -4650%. Target anggaran sebesar Rp 31.820.000, realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 31.520.000 atau 99,05%.

3. Meningkatnya Investasi di Kabupaten Bangka Tengah, dengan Target Indikator kinerja sebesar 2,50% dan terealisasi sebesar -51,66%, dengan capaian -2068%. Target anggaran sebesar Rp 617.674.000, realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 480.604.072 atau 77,80%.
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan, dengan Target Indikator kinerja sebesar 90,10 dan terealisasi sebesar 90,46 dengan capaian 99,30%. Target anggaran sebesar Rp 96.200.000, realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 95.529.264 atau 96,95%.
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, Target Indikator kinerja sebesar 80,70 dan terealisasi sebesar 76,54 dengan capaian 94,85%. Target anggaran sebesar Rp 4.512.274.000, realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 4.233.820.695 atau 93,82%.

Pada Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 5.297.908.000 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 4.880.455.023, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 92,12% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 7,88%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Bangka Tengah.